

Ziarah Ke (Pemikiran) Hatta: Dari Koperasi Menuju Ke Ekonomika Etik

Hudiyanto

Mohammad Hatta is one of Indonesian independence proclamar. Beside as a proclamar, Hatta denoted an Indonesian economics scholar who tried to understand the history and the problem of economical problem of his nation. He, then, formulated comprehensively the economic system of Indonesia that written at article 33 of Indonesian Constitution 1945. The following article, the author traces the implication of Hatta's thought regarding Cooperation in term of the developing of economics ethics of Indonesia

Kata-kata kunci: *Hatta, koperasi, ekonomika etik, dan agama.*

Salah satu kegiatan SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) setelah terpilih sebagai Presiden adalah berziarah ke makam Proklamator Kemerdekaan RI Bung Hatta, setelah sebelumnya ke makam Bung Karno di Blitar. Kunjungan ini tentu agak lain karena amat jarang tokoh politik yang berkunjung ke Bung Hatta sebagai Dwi Tunggal bersama Bung Karno di masa lalu. Pertanyaan dan sekaligus harapan yang muncul adalah seberapa jauh ziarah itu mempunyai makna substansial bagi aktualisasi pemikiran Hatta. Selain sebagai Proklamator, Hatta merupakan ahli ekonomi yang mencoba memahami sejarah ekonomi bangsanya, lalu dengan cerdas merumuskan sistem ekonomi yang akhirnya dituangkan dalam pasal 33 UUD 1945. Tulisan ini mencoba melihat implikasi ide Koperasi Bung Hatta dalam perbincangan tentang pengembangan ekonomika etik.

Hatta Tentang Ekonomi Bangsanya

Yang selalu ditanyakan ketika merefleksikan pikiran Hatta adalah, masih seperti

satu abad lalukah susunan ekonomi negeri ini? Lalu, bila masih seperti yang dulu, masih seperti Hattakah pikiran dari petinggi negeri ini? Dahulu, 60 tahun lampau, para pendiri bangsa ini meneguhkan tekad untuk membangun lewat keberpihakannya yang jelas (eksplisit) kepada ekonomi rakyat, ditandai oleh perumusan pasal 33 UUD 1945 (dengan penjelasannya!). Keberpihakan itu dilatarbelakangi oleh fakta bahwa ekonomi dari sebagian besar penduduk negeri ini berada jauh di lapisan bawah sebagaimana diungkapkan (Hatta, 1984).

Terdapat susunan perekonomian yang tiga lapis.

- (1) Lapis diatas, yang menguasai seluruh perekonomian kolonial adalah perekonomian kaum kulit putih. Produksi yang berhubungan dengan dunia luar hampir rata di tangan mereka: perkebunan, produksi industri, jalan perhubungan di laut sebagian di darat dan di udara, ekspor, impor, bank dan asuransi.
- (2) Lapis kedua yang menjadi perantara dengan masyarakat Indonesia berada kira kira 90 persen di tangan orang

Tiongkok dan Asia lainnya. Orang Indonesia yang dapat dimasukkan dalam lapis kedua ini paling banyak 10 persen, itupun menduduki tingkat sebelah bawah.

- (3) Lapis ketiga yang mengerjakan perekonomian segala yang kecil: pertanian kecil, pertukangan kecil, perdagangan kecil dan lain lain.

Lapis ketiga merupakan "dunia lain" yang tidak tersentuh oleh berbagai kebijakan ekonomi pemerintah. Hatta menjelaskan gambaran lapis ketiga yang merupakan perusahaan kecil (Hatta; 1984):

...sebagai tukang membetulkan sepatu yang rusak, dagang kecil seperti kelontong yang masuk kampung keluar kampung memikul barang dagangannya, warung atau toko yang dikemudikan sendiri dengan bantuan keluarga saja ...

Batasan dan contoh yang dikemukakan sederhana dan tegas, dan dengan batasan ini kita akan bisa melihat faktanya dalam kehidupan sehari-hari. Namun fakta itu tidak pernah nampak dalam peta kebijakan. Kebijakan pemerintah hanya menyentuh dan dinikmati oleh lapis pertama dan kedua, sehingga jurang pemisah antara kedua lapis ini dengan lapis ketiga cukup menganga. Suatu kondisi yang oleh Julius H Boeke dikenalkan sebagai adanya dualisme antara sektor modern (superior) dengan tradisional (inferior).

Desakan Berkoperasi

Kini, Bung Hatta telah almarhum yang tinggal hanya bisa diziarahi di makamnya. Bagaimana dengan struktur ekonomi Indonesia kini, dan masih haruskah kita meniru semangat Hatta? Tidak bisa dipungkiri, ekonomi Indonesia telah berkembang cukup pesat. Selama Orde Baru Indonesia menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, sehingga bersama 7 negara

lain menjadikan kawasan Asia Timur sebagai kawasan yang secara ekonomi mencengangkan (*East Asia Miracle*). Tetapi di balik itu data menunjukkan bahwa pertumbuhan cepat itu terutama dinikmati oleh hanya 0,2 persen usaha, sedangkan 98 persen lainnya (sekitar 40 juta usaha kecil). Usaha kecil (gurem, amat kecil) terabaikan dalam proses pembangunan. Bagaimanapun hal ini mengingatkan kembali pada "lapis ketiga yang dihuni oleh sebagian besar penduduk pribumi" sebagaimana dikemukakan Hatta. Indonesia telah terhubung dengan pasar dunia, tetapi ekonomi dan kebijakan ekonomi nasionalnya sering tidak "nyambung" dengan ekonomi usaha kecil.

Teori moneter sebagaimana dipakai oleh perbankan Indonesia dibawah pimpinan Bank Indonesia memainkan peran penting dalam sektor riil. Tetapi sektor riil yang mana? Bagi usaha kecil di kampung-kampung, para pedagang di pasar tradisional, para pedagang asongan dan kaki lima, dan pasar-pasar tradisional, instrumen moneter (bunga rendah-bunga tinggi), tak mengusiknya. Mereka tetap merupakan nasabah dari pelepas uang informal seperti rentenir, "bank thithil", "bank plecit" dan berbagai penamaan yang lain dengan bunga yang relatif tinggi (10-20 persen per bulan), sedangkan bunga di perbankan hanya 10 persen per tahun. Julius H Boeke menyebut mereka berada dalam "dunia lain" yang inferior, yang oleh karenanya cenderung tidak mendapatkan perhatian. Dengan kenyataan ekonomi semacam itu, terguhakah para ekonom untuk bereaksi sebagaimana dilakukan oleh Hatta? Sejauh kita lihat dalam perdebatan, mayoritas ekonom tidak melihatnya sebagai hal yang krusial.

Lapis (struktur) ekonomi kita kini, masih seperti yang digambarkan Hatta. Hatta meresponnya dengan menempatkan usaha

kecil itu dalam pusat perhatian. Tetapi kini, proses marginalisasi usaha kecil (yang benar benar kecil) berlangsung dengan kasat mata. Bagi BPPN misalnya kredit untuk usaha kecil dimaksudkan sebagai kredit yang maksimumnya adalah Rp. 10 milyar, Departemen Koperasi dan UKM mematok kredit untuk usaha kecil sebagai kredit sebesar Rp. 5 milyar. Bank Mandiri menggunakan omset sebesar Rp.360 milyar sebagai patokan. Definisi-definisi itu tentu amat berbeda dengan yang digunakan oleh Badan Pusat Statistik yaitu omset sebesar Rp.1 milyar dan kredit maksimum Rp400 juta.

Kekaburan dan simpang siurnya definisi usaha kecil jelas mempunyai konsekuensi tidak pernah terpetakannya kondisi usaha kecil. Hal ini bisa dilihat misalnya dalam kebijakan perkreditan yang merupakan masalah penting yang dihadapi oleh usaha kecil. Usaha kecil masih berkawan akrab dengan para pelepas uang. Para pelepas uang mengenakan bunga pinjaman yang cukup tinggi kepada usaha kecil. Tingkat bunga itu tidak pernah terpengaruh oleh naik turunnya suku bunga yang dilakukan oleh perbankan atas komando Bank Indonesia. Sebaliknya perbankan nasional dibawah pimpinan BI merupakan kawan akrab dari usaha usaha yang tidak kecil. Lapis ekonomi dengan pelaku yang masih belum lepas dari apa yang dikemukakan oleh Bung Hatta. Ada kesamaan meluasnya lapis usaha kecil yang tidak pernah menjadi perhatian utama pembangunan. Namun berbagai kesamaan kondisi masa lalu dan masa kini itu ternyata memunculkan reaksi yang amat berbeda

Gambaran struktur ekonomi yang timpang mendorong munculnya motivasi yang kuat di kalangan pejuang pergerakan Indonesia untuk mewujudkan Indonesia yang merdeka. Lebih dari itu, cita cita Indonesia merdeka tidaklah mencukupi bila

pengaturan ekonomi diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar. Perekonomian harus disusun sebagai usaha bersama atas dasar kekeluargaan. Hatta kemudian menekankan bahwa membangun ekonomi rakyat yang berada pada lapis paling bawah secara mutlak harus dengan jalan koperasi, sebagaimana dinyatakannya (Hatta,1984).

Itulah maka saya yakin bahwa koperasi adalah satu satunya jalan untuk mengangkat derajat ekonomi bangsa bangsa Asia Afrika yang baru terlepas dari penjajahan Belanda. Oleh karena kekuatan bagi rakyat yang lemah ekonominya hanya dapat ditimbulkan dengan jalan koperasi, maka koperasi menjadi *conditio sine qua non* sebagai dasar perekonomian rakyat.

Koperasi Seperti Apa?

Para peletak dasar negara Indonesia akhirnya merumuskan amanat dari bangsa Indonesia untuk menyusun perekonomian yang sesuai dengan tuntutan sejarah. Perekonomian disusun berdasarkan atas asas kekeluargaan dengan koperasi sebagai pengejawantahannya. Ditekankan pula bahwa koperasi bukanlah sekedar pada tingkat badan usaha berupa usaha koperasi melainkan lebih dari itu pada tingkatan susunan perekonomian yang sesuai bagi bangsa bangsa terbelakang. Koperasi sebagai sistem yang dianut di Indonesia ini tentu berbeda dengan koperasi yang berkembang di dunia barat yang sekedar menghilangkan dampak negatif dari kapitalisme. Tentang perbedaan koperasi yang berkembang di negara negara Eropa dan di Indonesia Hatta menulis:¹

¹ Mohammad Hatta, Koperasi Membangun dan Membangun Koperasi

Koperasi yang dikehendaki oleh undang-undang dasar kita adalah koperasi sebagai dasar perekonomian. Saya ulangi lagi, sebagai dasar! Bukan koperasi yang dibangun hanya sebagai koreksi terhadap kapitalisme yang diterima sebagai dasar perekonomian negeri, seperti yang didapati dunia Barat. Koperasi di sana tujuannya untuk memperoleh pembagian yang lebih adil di dalam perekonomian kapitalisme dan untuk mencapai produksi dan perolehan yang lebih rasional.

Dari kutipan tersebut jelas bahwa koperasi yang dikembangkan dan dimaksudkan di negara Barat sejak kelahirannya berbeda dengan koperasi yang dimaksudkan di Indonesia. Di negara-negara Barat koperasi dimaksudkan sebagai cara untuk meminimalisasi dampak buruk dari bekerjanya sistem ekonomi kapitalis. Sedangkan di Indonesia lebih dari itu, koperasi dijadikan sebagai alternatif sistem (dasar perekonomian) untuk mengatur perekonomian. Yang akan dikembangkan bukan hanya lembaga-lembaga bisnis koperasi, melainkan lebih dari itu adalah pengaturan ekonomi nasional yang mendasarkan diri pada prinsip-prinsip koperasi yaitu kerjasama.

Dari Koperasi Menuju Ekonomia Etik

Bung Hatta sebagai perumus pasal 33 UUD 1945 jelas menunjukkan bahwa koperasi yang seharusnya dibangun "bukan" koperasi yang dibangun hanya sebagai koreksi terhadap kapitalisme yang diterima sebagai dasar perekonomian negeri, seperti yang didapati dunia Barat. Koperasi di sana tujuannya untuk memperoleh pembagian yang lebih adil di dalam perekonomian kapitalisme dan untuk mencapai produksi dan perolehan yang lebih rasional. Ketika koperasi tidak akan hanya dikembangkan

untuk mengatasi dampak kapitalisme melainkan sebagai dasar ekonomi, jelas hal ini menantang ekonom dalam arus utama (*mainstream*) yang selalu menekankan tiada mungkin sistem lain diluar kapitalisme sosialisme. Arus utama itu yang juga cenderung menjadi arus utama dalam penyelenggaraan ekonomi oleh teknokrat.

Namun arus utama pada praktek penyelenggaraan ekonomi negara tetapi tidak diikuti oleh arus pemikiran alternatif. Dalam pemikiran, "arus utama" itu justru kehilangan popularitasnya ditunjukkan oleh tiadanya perdebatan sama sekali ketika kritik tajam yang dilancarkan oleh Mubyarto lewat beberapa penerbitannya bersama David Bromley *A Development Alternatives* (2002) dan beberapa penerbitan yang mengikutinya. Demikian pula dengan tulisan Sri Edi Swasono masa-masa terakhir, *Ekspose Ekonomika Indonesia* (Swasono, 2002). Pada sisi lain kritik gencar dilakukan oleh pegiat ekonomi Islam lewat gerakan ekonomi syariah di berbagai perguruan tinggi (UI, UGM, Trisakti dan perguruan Tinggi Islam pada umumnya). Kritik dan gerakan kritis itu sejalan dengan yang dilakukan oleh pakar dari Barat seperti yang secara "ringan" dilakukan lewat komik dari guru Besar Ekonomi Paul Ormerod berjudul *The Death of Economics* (1997) dan juga Amithai Etzioni dalam *The Moral Dimension: Towards a New Economics* (1998).

Keyakinan Hatta untuk membangun sistem koperasi (bukan kapitalisme) yang kemudian memunculkan perkembangan ekonomi alternatif sudah barang tentu sulit diterima ekonom *mainstream* mengingat kebersamaan (*cooperative*) yang menjadi dagangan kelompok alternatif bertentangan dengan persaingan (*competitive*) yang merupakan asumsi dasar kelompok *mainstream*. Namun nyatanya pemikiran baru yang merombak pemikiran

mainstream itu sama sekali tidak memunculkan reaksi apapun.

Mitos Tentang Sistem Ekonomi

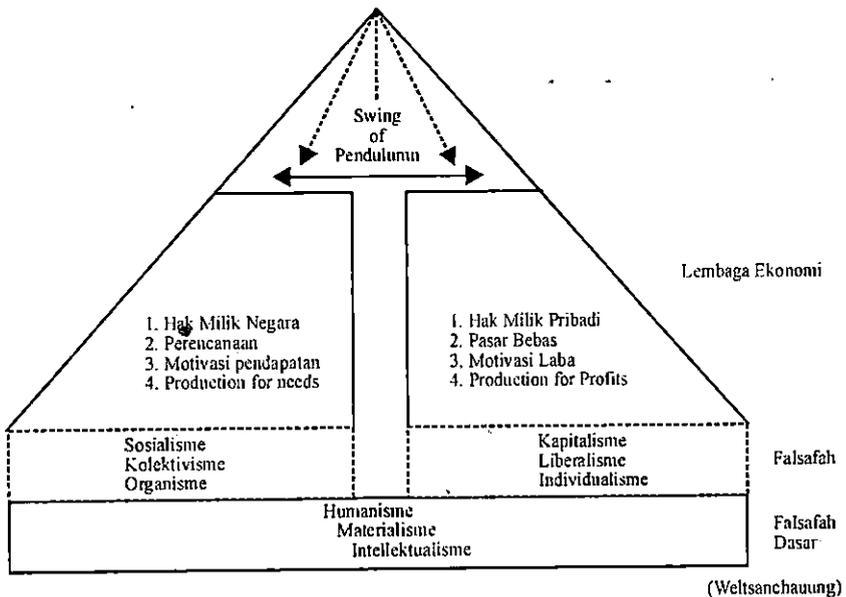
Secara umum diyakini bahwa di dunia ini hanya ada dua dunia: *kapitalisme* dan *sosialisme*. Berbagai pemikiran baru hanya disetujui sebagai "kembangan" (varian) dari kedua sistem ekonomi itu. Kembangan tentang kapitalisme memunculkan kapitalisme yang populis, yang manusiawi dan *welfare state*, sedangkan kembangan sosialisme memunculkan sosialisme yang bergerak ke demokrasi (*sosialisme demokrasi*). Dengan kata lain kapitalisme dan sosialisme berada pada dua titik ekstrem sedangkan berbagai sistem yang muncul atau dipikirkan belakangan berada diantara dua ekstrem itu.

Telah melekatnya keyakinan hanya adanya dua dunia, sosialisme-kapitalisme, menyebabkan cukup sulit untuk meyakinkan publik akan masih adanya "tempat" bagi

ekonomi alternatif. Namun bila dirunut pada falsafah yang mendasari akan ditemukan bahwa baik kapitalisme maupun sosialisme mempunyai akar falsafah yang sama yaitu falsafah barat (Yunani) yang sangat berbeda dengan falsafah Timur. Penelusuran dengan cara ini akan membawa kesimpulan bahwa "dua dunia" hanya-lah mitos, sehingga adanya dunia lain ada-lah faktual. Uraian berikut menggunakan cara dari Sutrisno PH (Sutrisno PH, 1984).

Kesamaan falsafah yang melandasi kapitalisme bisa dilihat dalam gambar 1. Kapitalisme melandaskan diri pada falsafah liberalisme, individualisme, rasionalisme atau intelektualisme, materialisme dan humanisme. Dilain pihak sosialisme mempunyai latar belakang kekuatan falsafah sosialisme, organisme, rasionalisme/intelektualisme, materialisme dan humanisme (Sutrisno PH, 1984). Rasionalisme adalah ajaran yang lebih menitikberatkan pada peranan rasio atau intelek dan

Gambar 1. Latar Belakang Filsafat Sosialisme dan Liberalisme



mengabaikan peranan emosi/ perasaan dalam menentukan hakekat kebenaran. Materialisme adalah paham yang menyatakan bahwa hakekat kebenaran adalah sesuatu yang dapat diterima oleh akal dan dapat dibuktikan secara empiris, yaitu dapat diraba, didengar, dirasakan. Sedangkan Humanisme adalah paham yang menyatakan bahwa bagi manusia yang penting adalah kehidupan di dunia ini, hidup sesudah itu adalah diluar jangkauan akal manusia.

Dengan demikian maka ada kesamaan penting yang harus disadari antara kapitalisme dan sosialisme yaitu bahwa keduanya mendasarkan pada materialisme, rasionalisme dan humanisme. Yang membedakan diantara keduanya hanyalah gerak pendulum (bandul jam) dari cara mewujudkan kekayaan fisik, apakah akan cenderung mengarah ke "bebas" atau "terkendali", liberal atau etatistik (serba negara). Gerak diantara keduanya akan memunculkan ekonomi campuran, "welfare state" atau sosdem yang kesemuanya sebenarnya masih dalam satu induk: materialisme, intelektualisme dan humanisme. Dalam kerangka ini maka perbedaan tajam diantara keduanya akhirnya hanya semacam sebuah mitos. Yang membedakan diantara keduanya hanyalah cara bagaimana kemegahan dunia bisa dipenuhi

Keniscayaan Ekonomika Etik

Berbagai bentuk campuran telah ditawarkan, namun ternyata tidak juga memberikan kepuasan pada sejumlah kalangan. Masih banyak pihak yang secara serius berusaha mencari sistem lain yang sesuai dengan falsafah hidup yang dipakainya yang dianggap lebih lebih etik: *ekonomi Pancasila*, *Ekonomi Islam*, *Sosialisme Islam* dan sebagainya. Seberapa

tepatkah sistem alternatif itu untuk diterapkan pada bangsa bangsa Timur seperti Indonesia? Hal ini hanya akan bisa dipahami dengan bertolak dari falsafah dasar yang digunakan kedua sistem "ekstrem" yaitu *rasionalisme*, *materialisme* dan *humanisme*.

Untuk menjawab pertanyaan apakah ada sistem lain yang benar benar di luar liberalisme kapitalisme, dan apakah pencarian akan sistem alternatif masuk akal atau tidak, layak atau tidak sangat tergantung pada keyakinan dan penerimaan akan adanya fakta empirik lain. Harus diakui ada kenyataan empirik yang menunjukkan tidak semua, bahkan sangat besar, bagian manusia di dunia yang meyakini bahwa ada kehidupan lain (dan lanjutan) dari kehidupan dunia ini (bukan humanisme!), bahwa pemenuhan kebutuhan hidup manusia tidaklah sekedar materi semata (bukan materialisme!) dan bahwa tidak semua hal bisa dinalar (bukan rasionalisme!), seperti yang diungkapkan oleh Etzioni

The neoclassical paradigm assume that people have one overarching goal: satisfying of their wants.. were depicted as materialistic. In contrast, my finding is that people have several wants, including the commitment to live up to their moral values, and that these wants cannot neatly ordered or regulated by prices.

Keinginan manusia dalam kenyataan empirik tidak hanya terpusat pada kebutuhan materialnya saja melainkan juga pada pemenuhan kebutuhan yang tidak material. Pandangan semacam itu adalah empirik sekaligus merupakan ajaran dari agama agama besar dan bahkan semua agama agama yang dianut umat manusia yang umumnya mengajarkan keseimbangan kepentingan hidup di dunia dan di hari akhir. Bahkan banyak yang secara ekstrem

mengambil posisi berseberangan dengan paham materialisme, humanisme, rasionalisme. Mereka secara ekstrem mempunyai paham spiritualisme berupa *eskapisme*, *zuhud*, atau lari dari kemegahan dunia untuk secara penuh mengabdikan diri dalam alam spiritual.

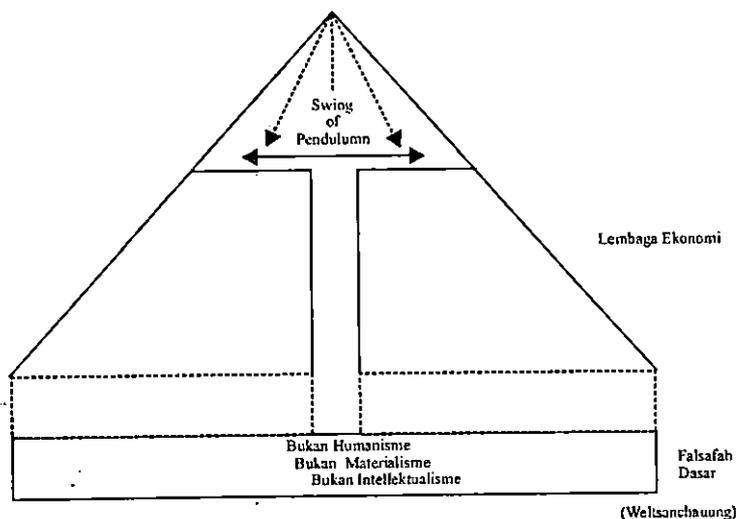
Falsafah yang "bukan materialisme, humanisme dan rasionalisme" adalah sesuatu yang empirik. Demikian juga secara empirik dari awal kehidupan sampai kini ia diikuti oleh bagian banyak umat manusia, bahkan bagian terbesar umat manusia. Masyarakat semacam itu bahkan secara terus menerus akan mengembangkan misi dan dakwah untuk mengubah paham "sekuler" itu menjadi lebih bermoral, mengubah dari materialistik ke spiritualistik.

Masyarakat semacam itu bukan hanya kenyataan empirik melainkan juga sekaligus sebuah masyarakat yang dicita-citakan. Dalam kaitan ini para penganut agama akan berupaya mewujudkan masyarakat yang tidak materialistis sekalipun lingkungan empiriknya materialistik! Apakah masyarakat seperti itu

"sudah masa lalu, kuno, dan oleh karenanya harus ditinggalkan dan dianggap tidak ada? Kalau berbagai agama dan kepercayaan itu semakin menguat pada masa mendatang, atau paling tidak bertahan, maka pikiran kearah ekonomi yang tidak "sekuler" merupakan sebuah keniscayaan. Sebaliknya kalau semua itu mengendur seiring perjalanan waktu, tentu pemikiran atas ekonomi moral merupakan sebuah utopia, atau langkah mundur jauh ke masa lalu yang oleh karenanya patut ditertawakan. Tetapi fakta menunjukkan perkembangan yang tidak pernah surut. Ini menunjukkan bahwa ekonomi etik atau apapun namanya bukanlah sebuah upaya yang "ngaya wara" atau tak punya arti.

Karena "falsafah lain" ternyata memang dianut dan empirik, maka penerapan sistem ekonomi baik sosialisme maupun kapitalisme tidaklah tepat (atau tidak mungkin, tidak boleh!) bagi masyarakat yang falsafahnya berbeda. Masyarakat semacam itu mungkin mempunyai perilaku yang memang berbeda sehingga harus diterapkan (atas dasar empirisme) sistem lain yang tepat. Namun

Gambar 2 Falsafah Timur Sebagai Landasan Sistem Ekonomi Alternatif (Pancasila, Islam)



bisa pula ditengah tengah kenyataan materialistik memang harus dibangun sistem alternatif karena memang sistem itulah yang diperintahkan dalam kitab suci atau konstitusi. Untuk mengakomodasi hal ini maka alternatif sistem memang harus dibangun, dan bangunan atas sistem itu dalam kapling yang memang di luar "dua dunia" sehingga pendulum seperti dalam gambar 2 pasti ada.

Pengajaran ilmu ekonomi neoklasik bukan saja telah membuat para mahasiswa, dan pelajar tahu mengenai mekanisme ekonomi dengan asumsi klasiknya. Penyederhanaan masalah lewat asumsi ini pada awalnya karena adanya keyakinan bahwa manusia memang bersifat serakah. Ketika diingatkan atau diyakinkan bahwa keyakinan itu tidak benar kemudian dikatakan bahwa asumsi sekedar diperlukan untuk menyederhanakan masalah. Sekilas nampaknya bisa diterima karena "mana mungkin menganalisis dengan memasukkan banyak faktor". Namun sikap semacam itu bukan saja menunjukkan kemalasan untuk berfikir dengan menciptakan model alternatif, lebih dari itu sikap tersebut amat berbahaya bagi perkembangan perilaku publik. Pengajaran selain berfungsi membuat orang tahu juga akan berdampak pada internalisasi nilai sebagaimana diajarkan pada diri seseorang dan secara luas bagi publik.

A Study of the educational effects of neoclassical teachings shows that students become more self oriented, just as they may become more rational in their decisions.....

Beyond the effects on students are those on the general public. All the prevailing neoclassical approach to moral values tends to debase them. All societies set aside certain areas as 'sacred'. To make the public think about these sacred ar-

eas in cost-benefit terms 'secularizes' them, strips them of their moral standing and ultimately causes them to be treated as neoclassicist say they are.

Karena internalisasi pengetahuan pada mahasiswa dan pelajar maka kebenaran yang dikemukakan oleh neoklasik pada akhirnya terinternalisasi dan tersosialisasi pada masyarakat sebagai sebuah kebenaran. Manusia serakah merupakan kebenaran yang telah diajarkan dan kemudian merupakan kebenaran yang harus dimanifestasikan dalam perilaku keseharian. Kecenderungan buruk inilah yang harus menyadarkan kita untuk tidak menyederhanakan pengajaran ekonomi dengan paradigma neoklasik.

Agama, Agamawan dan Pembangunan Ekonomika Etik

Apa yang dikemukakan oleh Adam Smith bahwa perilaku manusia ditentukan oleh aspek materi semata merupakan kebenaran bagi sebuah masyarakat yang melandaskan diri pada filosofi Barat atau yang mencitakan masyarakatnya berfilosofi Barat. Tetapi hal itu tidak bisa menghalangi adanya alternatif lain tentang hakikat kesejahteraan atau kebahagiaan manusia atau bangsa bangsa. Mereka yang yakin akan kehidupan setelah mati (seharusnya) pasti mengatakan bahwa pendorong pertumbuhan ekonomi bukanlah keserakahan melainkan sikap merasa cukup dan kerjasama antar orang (*taawwun ala al-birr, kerjasama dalam kebaikan*) karena ada hidup sesudah mati yang tidak bisa dibangun dengan keserakahan dunia yang pasti akan ditinggal di dunia. Dalam kaitan inilah ilmu koperasi (ekonomi etik pada umumnya) mempunyai landasan. Kalau ilmu ekonomi bisa dibangun atas landasan keserakahan, mengapa ilmu koperasi tidak bisa

dibandung bagi yang mempunyai "pandangan lain"

Yang mempunyai "pandangan lain" itu tidaklah maya, melainkan nyata. Mereka adalah kaum beragama. Dari mereka sebenarnya "harus muncul" penentangan terhadap ilmu ekonomi yang secara diame-tral bertentangan dengan ajaran agama. Kalangan umat atau agamawan hampir tidak abisa menolak perbedaan diametral ajaran ekonomi dengan ajaran agama. Namun hampir tidak ada dari mereka yang menggunakan otoritas keagamaan untuk menentang ilmu ekonomi yang serakah dengan merumuskan sistem ekonomi menurut agamanya. Namun akhir akhir ini berkembang semangat baru untuk mengembangkan apa yang disebut dengan Sistem Ekonomi Islam. Inti dari SEI tidak berbeda dengan sistem Koperasi atau Sistem Ekonomi Pancasila yaitu menentang ilmu ekonomi yang mengajarkan dan menghagumsikan keserakahan manusia. Upaya menentang pengembangan asumsi dan ajaran keserakahan adalah tugas yang amat besar. Oleh karena itu, kalau materialisme dianggap hantu, maka dengan otoritasnya berbagai pihak (kalangan agamawan) seharusnya mengembangkan sistem ekonomi sesuai dengan ajaran dasarnya masing masing. Pelabelan menurut agama masing masing mungkin diperlukan untuk menghentakkan ide. ●

Daftar Pustaka

- Etzioni, Amithai, 1998, *The Moral Dimensions, Towards a New Economics*. New York: Free Press.
- Hatta, Mohammad, 1985. *Membangun Koperasi dan Koperasi Membangun*, Jakarta: Inti Idayu Press.

Hatta, *Beberapa Fatsal Menuju ke Ekonomi Koperasi*,

Hudiyanto, "Globalisasi,; IMF, Bank Dunia dan Amandemen Pasal 33, ", dalam UNISIA, No 50/XXVII/2003

Hudiyanto, *Ayun Pendulum Kapitalisme Sosialisme*, 2002. Yogyakarta: PPEUMY.

Koperasi, Sistem, Ideologi dan Pengelolaan, 2002, Yogyakarta: UII Press.

Lunati, M Theresa, *Ethical lossue in Economics: From Altruism to Cooperation to Equity*, MacMillan Press, London, 1997

Mubyarto, 2004. *Neo Liberalisme dan Krisis Ilmu Ekonomi*, Yogyakarta: PUSTEP.

Mübyarto, 2004. *Teknokrat dan Ekonomi Pancasila*, Yogyakarta: PUSTEP UGM.

Mubyarto dan Daniel Bromley, 2002. *A Development Alternatives for Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Raharjo, *Dawam*, 2004. *Ekonomi Pancasila*, Yogyakarta: PUSTEP UGM.

Sutrisno PH, 1984. *Welfare Economy*, Yogyakarta: BPF E.

Swasono, Sri-Edy, 2003. *Ekspose Ekonomika Indonesia, Globalisasi dan Kompetisi Sarjana Ekonomi*, Yogyakarta: Pusat Studi Ekonomi UGM (PUSTEP) UGM.

